

DAMPAK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP PARTISIPASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN DI PEDAMARAN TIMUR, OGAN KOMERING ILIR

**Siti Zubaidah¹, Hermansyah², Vera Finindia Indah³, Rusdi Laili⁴, Yuniarti⁵,
Hatta. M. Saleh⁶**

^{1), 2), 4), 5), 6)} STIA Bala Putra Dewa Palembang

³⁾ STIE Aprin Palembang

Email Correspondence : sitizu@kampusbalaputradewa.ac.id

ABSTRACT

This research examines the influence of community empowerment on participation in the development and maintenance of rural environmental facilities and infrastructure in East Pedamaran District, Ogan Komering Ilir Regency. Community empowerment is critical in increasing active involvement in local development programs, which in turn improves the quality and sustainability of infrastructure. This research focuses on identifying the extent to which empowerment efforts, such as capacity building, resource access, and decision-making involvement, influence community participation. Data was collected through surveys and interviews with community members and local authorities. The research results show a significant positive relationship between empowerment initiatives and increased participation in infrastructure development and maintenance. Active participation not only accelerates infrastructure development but also ensures long-term maintenance through a sense of ownership and responsibility. This study highlights the importance of sustained community engagement and empowerment strategies to promote sustainable rural development.

Keywords: *Rural Infrastructure, Participation, East Pedamaran Development, Community Empowerment.*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pengaruh pemberdayaan masyarakat terhadap partisipasi dalam pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pedesaan di Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pemberdayaan masyarakat sangat penting dalam meningkatkan keterlibatan aktif dalam program pembangunan lokal, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas dan keberlanjutan infrastruktur. Penelitian ini berfokus pada mengidentifikasi sejauh mana upaya pemberdayaan, seperti peningkatan kapasitas, akses sumber daya, dan keterlibatan pengambilan keputusan, memengaruhi partisipasi masyarakat. Data dikumpulkan melalui survei dan wawancara dengan anggota masyarakat dan otoritas setempat. Hasil penelitian menunjukkan hubungan positif yang signifikan antara inisiatif pemberdayaan dan peningkatan partisipasi dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. Partisipasi aktif tidak hanya mempercepat pembangunan infrastruktur tetapi juga memastikan pemeliharaan jangka panjang melalui rasa kepemilikan dan tanggung jawab. Studi ini menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat yang berkelanjutan dan strategi pemberdayaan yang disesuaikan untuk mendorong pembangunan pedesaan yang berkelanjutan.

Kata kunci: *Infrastruktur Pedesaan, Partisipasi, Pedamaran Timur, Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat.*

A. PENDAHULUAN

Pembangunan pedesaan memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan, dengan penekanan khusus pada infrastruktur, yang merupakan kunci kemajuan ekonomi dan sosial. Di negara berkembang seperti Indonesia, memastikan infrastruktur pedesaan yang memadai, seperti jaringan transportasi, sistem sanitasi, dan utilitas publik, sangat penting untuk mendukung kegiatan pertanian, akses ke pasar, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Namun, keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan tersebut sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat setempat (Bank Dunia, 2020). Partisipasi masyarakat lokal dalam proyek infrastruktur, baik dalam fase pengembangan maupun pemeliharaan, telah diidentifikasi sebagai faktor penting dalam memastikan bahwa infrastruktur memenuhi kebutuhan lokal dan tetap berfungsi dari waktu ke waktu (Pretty, 1995).

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur pedesaan seringkali terkait erat dengan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan, seperti yang didefinisikan oleh Zimmerman (2000), mengacu pada proses di mana individu dan komunitas memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kepercayaan diri untuk membuat keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Dalam konteks pembangunan pedesaan, pemberdayaan masyarakat melibatkan kemampuan penduduk setempat untuk mengambil bagian dalam perencanaan, pelaksanaan,

dan pemantauan proyek infrastruktur. Masyarakat yang diberdayakan lebih cenderung menyumbangkan sumber daya, memberikan pengetahuan lokal, dan memastikan pemeliharaan fasilitas yang tepat (Narayan, 2002). Ini sangat penting di daerah pedesaan di mana sumber daya pemerintah mungkin terbatas, dan keterlibatan lokal dapat secara signifikan meningkatkan efektivitas upaya pembangunan.

Di Indonesia, pemberdayaan masyarakat telah menjadi landasan dari berbagai program pembangunan pedesaan yang diinisiasi oleh pemerintah. Salah satu inisiatif tersebut adalah *Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa* (P3MD), yang menekankan keterlibatan masyarakat desa dalam semua tahapan pembangunan infrastruktur. Program ini, bersama dengan *Dana Desa*, telah berperan penting dalam mempromosikan perencanaan dan pengambilan keputusan partisipatif di daerah pedesaan (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2019). Terlepas dari upaya ini, kesenjangan dalam tingkat partisipasi masyarakat tetap ada, dengan kelompok-kelompok tertentu, seperti perempuan, orang tua, dan orang miskin, sering dikecualikan dari proses pengambilan keputusan (Laverack & Labonte, 2000).

Kecamatan Pedamaran Timur, yang terletak di Kabupaten Ogan Komering Ilir, adalah daerah yang didominasi pedesaan di mana pembangunan infrastruktur sangat penting untuk meningkatkan kondisi kehidupan dan mendukung produktivitas pertanian. Namun, tantangan seperti sumber daya yang

terbatas, kurangnya keahlian teknis, dan keterlibatan masyarakat yang tidak merata telah memengaruhi keberlanjutan proyek infrastruktur lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki sejauh mana upaya pemberdayaan masyarakat mempengaruhi partisipasi dalam pengembangan dan pemeliharaan fasilitas lingkungan pedesaan di wilayah ini.

Memahami hubungan antara pemberdayaan dan partisipasi sangat penting untuk merancang kebijakan dan program yang mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pembangunan pedesaan. Temuan penelitian ini akan berkontribusi pada tubuh pengetahuan tentang pembangunan yang digerakkan oleh masyarakat dan memberikan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan dan pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas program infrastruktur pedesaan.

Pemberdayaan OMnunity telah diakui secara luas sebagai faktor kunci dalam mempromosikan pembangunan pedesaan yang berkelanjutan, terutama di negara-negara berkembang. Studi terbaru menekankan peran pendekatan partisipatif dalam pembangunan infrastruktur, yang mengarah pada hasil yang lebih efektif dan sensitif konteks. Penelitian oleh Narayan (2002) dan Pretty (1995) menyoroti bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, alokasi sumber daya, dan implementasi proyek secara signifikan meningkatkan kualitas dan daya tahan proyek infrastruktur pedesaan. Selain itu, menumbuhkan rasa kepemilikan, memastikan pemeliharaan jangka panjang dan perawatan fasilitas umum oleh penduduk setempat.

Model pembangunan partisipatif juga telah didukung oleh lembaga internasional seperti Bank Dunia, yang mengadvokasi pendekatan dari bawah ke atas dalam proyek pembangunan pedesaan. Memberdayakan masyarakat lokal untuk bertanggung jawab atas tujuan pembangunan mereka tidak hanya menyelaraskan pembangunan infrastruktur dengan kebutuhan lokal tetapi juga meningkatkan kohesi sosial dan kemandirian (Bank Dunia, 2020). Beberapa negara, termasuk Indonesia, telah mengadopsi program pembangunan berbasis masyarakat seperti *Dana Desa* dan *P3MD*, yang bertujuan untuk mendesentralisasikan proses pengambilan keputusan dan memberdayakan desa untuk mengelola sumber daya pembangunan mereka (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2019). Program-program ini mencerminkan tren global yang bergeser dari pembangunan pedesaan top-down yang dipimpin pemerintah ke model berbasis komunitas yang lebih inklusif.

Namun, masih ada kesenjangan yang signifikan dalam literatur dan praktik, terutama mengenai tingkat pemberdayaan dan dampak aktualnya terhadap partisipasi dalam proyek infrastruktur pedesaan. Meskipun kerangka teoritis pemberdayaan masyarakat sudah mapan, ada kurangnya bukti empiris tentang bagaimana berbagai dimensi pemberdayaan—seperti akses ke sumber daya, pengetahuan, otoritas pengambilan keputusan, dan peningkatan kapasitas—memengaruhi partisipasi masyarakat di berbagai tahap pembangunan infrastruktur. Selain itu, sebagian besar penelitian saat ini

berfokus pada manfaat partisipasi masyarakat tanpa mengatasi tantangan dan hambatan yang membatasi keterlibatan, terutama untuk kelompok terpinggirkan seperti perempuan, orang tua, dan populasi yang kurang beruntung secara ekonomi (Laverack & Labonte, 2000).

Dalam konteks Indonesia, meskipun program seperti *Dana Desa* telah menunjukkan beberapa keberhasilan, tantangan tetap ada dalam memberdayakan masyarakat pedesaan sepenuhnya. Misalnya, penelitian telah menunjukkan bahwa di beberapa daerah, proses pengambilan keputusan masih didominasi oleh elit lokal, membatasi partisipasi masyarakat yang lebih luas (Antlöv, Wetterberg, & Dharmawan, 2016). Selain itu, kurangnya mekanisme pemantauan dan evaluasi yang konsisten untuk menilai dampak jangka panjang dari program pemberdayaan terhadap pemeliharaan dan keberlanjutan infrastruktur.

Studi ini berupaya berkontribusi pada pemahaman tentang bagaimana pemberdayaan masyarakat memengaruhi partisipasi dalam pembangunan infrastruktur pedesaan. Dengan berfokus pada kasus Kecamatan Pedamaran Timur, ini menawarkan wawasan praktis bagi pemerintah daerah dan praktisi pembangunan tentang bagaimana mendorong proses pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Temuan ini akan sangat berharga bagi pembuat kebijakan, membantu mereka merancang program berbasis masyarakat yang lebih efektif yang selaras dengan kebutuhan dan kondisi spesifik masyarakat pedesaan.

Terlepas dari meningkatnya

penekanan pada pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan pedesaan, ada beberapa kesenjangan kritis baik dalam teori maupun praktik:

1. Kurangnya Bukti Empiris tentang Dampak Pemberdayaan terhadap Partisipasi

Meskipun konsep pemberdayaan masyarakat diterima secara luas, ada data empiris terbatas yang secara khusus menganalisis bagaimana upaya pemberdayaan memengaruhi partisipasi dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pedesaan. Kesenjangan ini terutama terlihat di daerah seperti Pedamaran Timur, di mana studi yang ada cenderung berfokus pada implementasi proyek pembangunan pedesaan daripada hubungan pemberdayaan-partisipasi.

2. Hambatan untuk Partisipasi Inklusif

Sebagian besar penelitian yang ada berfokus pada manfaat partisipasi tanpa mengatasi tantangan yang mencegah kelompok tertentu dalam komunitas untuk terlibat sepenuhnya. Perlu adanya kajian yang lebih mendalam tentang hambatan yang dihadapi oleh kelompok marginal—seperti perempuan, lansia, dan penduduk berpenghasilan rendah—di daerah pedesaan seperti Pedamaran Timur, terutama dalam proses pengambilan keputusan.

3. Keberlanjutan Inisiatif Pemberdayaan

Ada kesenjangan dalam memahami keberlanjutan jangka panjang inisiatif pemberdayaan dalam pembangunan infrastruktur pedesaan. Banyak penelitian menyoroti manfaat jangka pendek dari partisipasi masyarakat tetapi gagal menyelidiki

apakah program pemberdayaan mengarah pada keterlibatan berkelanjutan dalam pemeliharaan dan pemeliharaan infrastruktur dari waktu ke waktu.

4. Strategi Spesifik Konteks untuk Pemberdayaan

Penelitian yang ada tentang pemberdayaan masyarakat sering menerapkan pendekatan satu ukuran untuk semua, kurang memperhatikan konteks sosial-ekonomi, budaya, dan politik yang unik di daerah pedesaan. Studi yang lebih spesifik konteks diperlukan untuk mengeksplorasi bagaimana strategi pemberdayaan dapat disesuaikan untuk mengatasi kebutuhan dan tantangan spesifik dari berbagai komunitas pedesaan, termasuk Pedamaran Timur.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan memberikan analisis empiris tentang hubungan antara pemberdayaan masyarakat dan partisipasi dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pedesaan di Kecamatan Pedamaran Timur. Ini juga akan mengeksplorasi hambatan spesifik untuk berpartisipasi dan mengusulkan strategi untuk meningkatkan inisiatif pemberdayaan dalam konteks lokal.

Tujuan Penelitian untuk penelitian:

1. Untuk menilai dampak pemberdayaan masyarakat terhadap partisipasi dalam pembangunan infrastruktur pedesaan di Pedamaran Timur.
2. Untuk mengidentifikasi hambatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur.
3. Memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pemberdayaan

masyarakat dan keterlibatan dalam program pembangunan pedesaan.

B. KAJIAN PUSTAKA

Pembangunan masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat merupakan konsep yang relatif baru, di mana masyarakat tidak lagi hanya dijadikan objek dalam pembangunan tetapi juga sebagai subjek pembangunannya sendiri (Kartasasmita, (Zubaedi, 2013: 15). Oleh karena itu, Webster dalam Kamus Bahasa Inggris Oxford (Sedarmayanti, 2000: 78) menjelaskan bahwa: Kata memberdayakan memiliki 2 arti. Makna pertama adalah memberikan kekuasaan atau otoritas, dan makna kedua adalah memberikan kemampuan atau memampukan. Dalam pengertian pertama diartikan sebagai pemberian kekuasaan, pengalihan kekuasaan atau pendeklegasian kekuasaan kepada pihak lain. Sementara itu, dalam pengertian kedua, diartikan sebagai upaya untuk memberikan kemampuan atau pemberdayaan.

Lebih lanjut, Pranarka & Priyono (Sedarmayanti, 2000: 79) mengatakan bahwa definisi pemberdayaan memiliki dua kecenderungan, yaitu:

- (1) Pemberdayaan menekankan pada proses pemberian atau transfer sebagian dari kekuasaan, kekuatan atau kemampuan (kekuasaan) kepada masyarakat, organisasi atau individu sehingga menjadi lebih berdaya. Proses ini sering disebut sebagai tren utama dari makna pemberdayaan.
- (2) Kecenderungan sekunder, menekankan proses merangsang, mendorong dan memotivasi individu untuk memiliki kemampuan atau pemberdayaan

untuk menentukan apa pilihan hidup mereka.

Definisi ini menggambarkan bahwa pemberdayaan adalah proses yang disengaja dan direncanakan secara berkesinambungan serta memiliki tujuan, yaitu mereka yang diberdayakan memiliki akses untuk mendapatkan dan mengendalikan sumber daya yang ada. Lebih lanjut, Sumodiningrat (1999: 5) menyatakan bahwa: dalam setiap upaya pemberdayaan baik yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha atau pihak yang peduli terhadap masyarakat, setidaknya harus mengandung lima hal utama, yaitu: "Ada stimulan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, membangun infrastruktur dan mengembangkan/pengembangan kelembagaan pedesaan".

Mengenai strategi pemberdayaan masyarakat, Prijono (1996:73) menyarankan sebagai berikut:

- (1). Kesempatan yang sama.
- (2). Relevansi.
- (3). Kualitas.
- (4). Koordinasi kegiatan.
- (5). Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana.

Sementara itu, menurut Mark G. Hanna dan Buddy Robinson dalam Hikmat (2004: 19) bahwa ada tiga strategi utama pemberdayaan dalam praktik perubahan sosial, yaitu: a) strategi tradisional, b) strategi aksi langsung, c) strategi transformatif. Strategi tradisional menyarankan untuk mengetahui dan memilih kepentingan terbaik secara bebas dalam berbagai keadaan. Strategi aksi langsung membutuhkan dominasi kepentingan yang dihormati oleh semua pihak yang terlibat, dilihat dari sudut pandang perubahan yang terjadi. Strategi

transformatif menunjukkan bahwa dalam jangka panjang diperlukan pendidikan massa sebelum identifikasi kepentingan pribadi.

Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Istilah partisipasi mengandung berbagai arti tergantung pada sudut pandang yang berbeda. Peter (1992: 217) memberikan definisi partisipasi berikut: "Partisipasi didefinisikan sebagai keterlibatan mental dan emosional individu dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk berkontribusi pada tujuan kelompok dan berbagi tanggung jawab untuk ". Ada tiga hal utama yang terkandung dalam batasan tersebut, yaitu: (1) keterlibatan mental dan emosional, (2) keragaman kontribusi yang diberikan untuk mendukung pencapaian tujuan kelompok, (3) membangkitkan kemauan untuk bertanggung jawab di antara sesama anggota kelompok.

Partisipasi masyarakat dikenal sebagai konsep produksi bersama. Pada dasarnya, teori produksi bersama mengkonseptualisasikan pemberian layanan sebagai pengaturan dan proses, di mana pemerintah dan masyarakat berbagi tanggung jawab (tanggung jawab bersama) dalam memberikan pelayanan publik (Marshall, 2004: 232). Sehingga tidak lagi membedakan anggota masyarakat sebagai pelanggan tradisional dengan pemerintah sebagai penyedia layanan. Kedua belah pihak dapat bertindak sebagai bagian dari penyedia layanan. Berdasarkan pembahasan sebelumnya mengenai konsep partisipasi masyarakat, dalam penelitian ini digunakan dimensi partisipasi masyarakat menurut Ndraha (2011:

126), yang terdiri dari: perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, penerimaan dan pemanfaatan hasil pembangunan, serta evaluasi pembangunan.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berupaya menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, yaitu seberapa besar pengaruh pemberdayaan masyarakat terhadap partisipasi dalam Program Pengembangan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana/Prasarana Lingkungan Hidup di Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Penelitian ini juga dilakukan untuk menemukan hubungan kausal antar variabel penelitian melalui pengujian hipotesis.

Dalam penelitian ini, unit analisis dan objek penelitian memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Unit analisis adalah kepala keluarga di desa-desa yang tersebar di Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kepala keluarga adalah anggota masyarakat yang menjadi subjek atau pelaku pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Kajian unit analisis dilakukan untuk mengamati, menjelaskan dan mengukur variabel yang berfokus pada manusia, fakta vital dari manusia, pendapat, sikap, motivasi dan perilaku.
3. Analisis dilakukan pada sampel, tetapi kesimpulannya diterapkan pada seluruh populasi. Berdasarkan pertimbangan rumusan masalah, tujuan penelitian dan memperhatikan

karakteristik objek penelitian tersebut di atas, desain metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan survei atau penelitian korelasional.

Menurut Rusidi (2008: 3), penelitian survei digunakan untuk mengembangkan dan menguji kebenaran pengetahuan dengan menguji hipotesis. Tujuan yang ingin dicapai dengan metode ini adalah teori non-eksaktual yang dikembangkan melalui pengujian kerja penelitian (verifikasi) proposisi faktual; yang berarti proposisi deduktif yang diuji secara empiris. Metode ini sering disebut sebagai penelitian pengujian. Jadi, sebagai penelitian pengujian, metode survei penjelasan ini terlebih dahulu menghasilkan sesuatu yang akan diuji, yaitu deduksi hasil pemikiran deduktif (konstruksi logis/kerangka pikiran) yang disebut hipotesis.

Sementara itu, untuk mendukung desain penelitian survei, data kualitatif juga digunakan melalui wawancara dan observasi. Hal ini dilakukan dengan: (1) fakta dan informasi yang masih perlu digali lebih mendalam, (2) untuk mendapatkan gambaran fenomena dan fakta yang lebih komprehensif dan terintegrasi, dan (3) untuk melakukan verifikasi dalam rangka memperjelas data dan informasi sehingga dapat berkontribusi pada penjelasan fakta yang diperoleh melalui pendekatan survei.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembangunan daerah dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah yang menempatkan masyarakat sebagai

pelaku utama dalam pembangunan (people centered development) hanya dapat berjalan dan berhasil jika masyarakat terlibat dalam seluruh proses pengelolaan pembangunan. Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat adalah proses di mana berbagai pemangku kepentingan dapat mempengaruhi dan berbagi kewenangan dalam menentukan inisiatif pembangunan, mengambil keputusan, dan mengalokasikan sumber daya yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Selama ini, dalam pembangunan yang dilakukan di Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur pedesaan meliputi:

- (1) Tingkat partisipasi masyarakat di berbagai bidang pembangunan infrastruktur pedesaan umumnya rendah. Kecuali partisipasi di bidang keagamaan dalam kategori tinggi, partisipasi masyarakat di bidang pertanian, pendidikan, pemerintahan, kesehatan, perumahan/lingkungan, dan di sektor ekonomi/koperasi berada pada kategori rendah.
- (2) Tingkat partisipasi lembaga masyarakat desa dalam pembangunan infrastruktur pedesaan juga relatif rendah. Kecuali lembaga keagamaan yang tergolong tinggi, tingkat partisipasi lembaga pemerintah desa, organisasi kepemudaan, koperasi desa, lembaga pemerintahan adat, dan lembaga ketahanan masyarakat desa rendah.
- (3) Banyak faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi anggota masyarakat dan lembaga di desa.

Faktor utamanya terkait dengan tingkat pendapatan penduduk yang sangat rendah (dalam bentuk uang/rupiah). Karena tingkat pendapatan penduduk merupakan faktor sentral untuk kegiatan pembangunan lainnya. Faktor lain yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi adalah hubungan dengan dunia luar, infrastruktur dan sarana transportasi hasil pertanian, adat istiadat setempat, dan lokasi desa dari pusat kabupaten/kecamatan serta kualitas dan keikhlasan pejabat pemerintah dalam melayani masyarakat desa. Faktor waktu, yaitu lamanya waktu penduduk mengenal budaya luar, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Hasil pelaksanaan program pembangunan infrastruktur pedesaan sebagai prioritas pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk mendukung Visi dan Misi 2018-2023, saat ini menunjukkan kondisi keterlibatan masyarakat sebagai berikut:

- (1) Dalam perencanaan, keterlibatan masyarakat masih terbatas pada usulan sedangkan Penetapan rencana kegiatan masih didominasi oleh pemerintah kecamatan.
- (2) Dalam pelaksanaan program pembangunan fisik seperti pembangunan dan peningkatan infrastruktur desa, masyarakat dilibatkan sebagai pelaksana kegiatan karena menerima imbalan atau upah.
- (3) Evaluasi program dilakukan dalam kegiatan perencanaan yang

diajukan oleh tokoh masyarakat.

- (4) Hasil kegiatan berupa pembangunan fisik dapat dinikmati oleh seluruh anggota masyarakat namun kegiatan pembangunan ekonomi masyarakat tidak berkembang karena tidak ada peningkatan pendapatan yang signifikan.

Hasil pelaksanaan pengembangan, pengembangan dan pemeliharaan Program sarana/prasarana lingkungan hidup pedesaan yang diselenggarakan menggambarkan bahwa tujuan utama dari pengembangan, pengembangan dan pemeliharaan program sarana/prasarana lingkungan pedesaan adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, khususnya program pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana/prasarana lingkungan pedesaan ke kabupaten belum tercapai dalam artian belum disusun dokumen perencanaan daerah dalam terpadu dan komprehensif, mulai dari tingkat infrastruktur desa hingga kabupaten. Namun, telah terjadi kesadaran dan perubahan pola pikir pemerintah untuk mengelola pembangunan daerah secara partisipatif. Begitu pula dengan masyarakat mulai sadar akan hak-haknya dalam pembangunan infrastruktur pedesaan dan ada semangat untuk menyusun rencana pembangunan desa.

Hasil penelitian di atas menggambarkan bahwa partisipasi masyarakat dalam program pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana/prasarana lingkungan pedesaan dari waktu ke waktu belum menunjukkan peningkatan

yang signifikan. Kondisi ini juga terindikasi pada tingkat makro dengan tingkat kemiskinan masyarakat. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat yang tercermin dari hasil penelitian di atas serta data keluarga miskin yang mencakup mayoritas penduduk di Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sejalan dengan fenomena yang diamati penulis melalui studi pendahuluan dalam rangka penelitian penulisan disertasi ini. Fenomena yang dimaksud adalah:

- (1) Keterlibatan masyarakat dalam pertemuan infrastruktur desa untuk mengambil keputusan mengenai program dan kegiatan pembangunan infrastruktur pedesaan masih rendah. Hal ini disebabkan oleh persepsi bahkan trauma dari masyarakat atas pengalaman masa lalu di mana program pembangunan yang diusulkan umumnya tidak terwujud.
- (2) Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program sukarela, khususnya dalam donasi materi, masih rendah, kecuali pembangunan tempat ibadah. Hal ini terkait dengan kemampuan atau pendapatan masyarakat yang masih terbatas.
- (3) Lembaga infrastruktur pedesaan seperti pemerintah infrastruktur pedesaan dan badan konsultatif infrastruktur pedesaan belum berfungsi dengan baik dalam mendukung pembangunan masyarakat di infrastruktur pedesaan yang bersangkutan.
- (4) Program pemberdayaan pedesaan dan infrastruktur telah berjalan sejak 2012 tetapi masih berjalan lebih fokus pada pemberdayaan desa dan

- alokasi dana infrastruktur pedesaan yang disalurkan kepada kelompok usaha/kegiatan masyarakat. Alokasi dana tersebut belum didukung oleh peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta pendampingan yang berkelanjutan sehingga program pemberdayaan masyarakat belum berhasil secara maksimal.
- (5) Mekanisme pencairan dan pertanggungjawaban dana pemberdayaan infrastruktur pedesaan yang cukup rumit bagi masyarakat infrastruktur pedesaan membuat mereka mengalami keterlambatan dalam melaksanakan program pemberdayaan desa.

Berdasarkan fenomena dan latar belakang pemikiran di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Pemberdayaan Masyarakat terhadap Partisipasi dalam Program Pembangunan, Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana/Prasarana

Lingkungan Perdesaan di Kecamatan Pedamaran Timur, Kabupaten Ogan Komering Ilir".

Efek Langsung dan Tidak Langsung dari Variabel Independen pada Variabel Dependend

Pembahasan lebih lanjut mengenai besarnya pengaruh langsung dan tidak langsung variabel X (Pemberdayaan Masyarakat) yang terdiri dari X1 (Iklim Kondusif), X2 (Penguatan Kapasitas) dan X3 (perlindungan masyarakat) terhadap Y (Partisipasi dalam Pembangunan), dijelaskan sebagai berikut:

1. Kontribusi X1 (Iklim kondusif terhadap Y (partisipasi dalam pembangunan)

Kontribusi langsung dan tidak langsung dari X1 (Iklim Kondusif) terhadap Y (Partisipasi dalam Pembangunan), dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1
Pengaruh langsung dan tidak langsung X1 (iklim kondusif) terhadap Y (partisipasi dalam pembangunan).

Interpretasi analisis jalur		
Informasi	Penjelasan	Efek (%)
X1	Efek langsung ke Y	12.44
	Efek tidak langsung melalui X2 hingga Y	4.61
	Efek tidak langsung melalui X3 hingga Y	3.03
Total efek X1 menuju Y		20.08

2. Kontribusi X2 (penguatan kapasitas) ke Y (partisipasi dalam pembangunan).

Kontribusi langsung dan tidak

langsung dari X2 (Capacity Penguin) terhadap Y (Participation in Development), dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2
Efek langsung dan tidak langsung X2 terhadap Y.

Interpretasi analisis jalur		
Informasi	Penjelasan	efek (%)
X2	Efek langsung ke Y	6.88
	Efek tidak langsung terhadap X1 ke Y	4.61
	Efek tidak langsung terhadap X3 ke Y	1.10
Total efek X2 menuju Y		12.60

Hasil tes di atas sejalan dengan hasil analisis deskriptif yang menunjukkan secara meyakinkan bahwa partisipasi dalam pembangunan sangat dipengaruhi oleh penguatan kapasitas masyarakat melalui peningkatan pendidikan dan keterampilan, kesehatan masyarakat, ekonomi rakyat, penyediaan infrastruktur pendukung, dan kelembagaan. Indikator dalam dimensi penguatan kapasitas masyarakat. Penguatan kapasitas juga ditunjukkan dengan penguatan kelembagaan sosial. Penguatan kelembagaan sosial di desa akan menjadi jaminan dan penggerak pembangunan desa di masa depan. Kepala Bappeda dan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa

(BPMK) menyampaikan pendapat yang sama bahwa melalui program pemberdayaan pemerintah telah mendeklasikan kewenangan dan keuangan kepada Desa sehingga untuk pengelolaannya perlu dilakukan peningkatan kapasitas masyarakat termasuk lembaga sosial yang ada kekuatan untuk pembangunan desa di masa depan. Kepala Bappeda dan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMK) menyampaikan pendapat yang sama bahwa melalui program pemberdayaan pemerintah telah mendeklasikan kewenangan dan keuangan kepada Desa sehingga untuk pengelolaannya perlu dilakukan peningkatan kapasitas masyarakat termasuk lembaga sosial yang ada.

3. Kontribusi (Dimensi perlindungan masyarakat) terhadap Y (Partisipasi dalam Pembangunan).

Kontribusi langsung dan tidak

langsung dari X3 (perlindungan publik) terhadap Y (Partisipasi dalam Pembangunan), ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3
Efek Langsung dan Tidak Langsung X₃ ke arah Y.

Interpretasi analisis jalur		
Informasi	Penjelasan	efek (%)
Dimensi kepedulian masyarakat	Efek langsung ke Y	2.25
	Efek tidak langsung terhadap X1 ke Y	3.03
	Efek tidak langsung terhadap X2 ke Y	1.10
Total pengaruh dimensi kepedulian masyarakat		6.38

Hasil analisis yang disajikan pada tabel di atas menunjukkan bahwa kontribusi langsung X3 (perlindungan publik) terhadap Y (Partisipasi dalam Pembangunan) adalah 2,25%. Kontribusi tidak langsung dari X3 (perlindungan masyarakat) melalui X1 (Iklim Kondusif) terhadap Y (Partisipasi dalam Pembangunan) adalah 3,03%. Kontribusi tidak langsung dari X3 (perlindungan publik) melalui X2 (Penguatan Kapasitas) terhadap Y (Partisipasi dalam Pembangunan) adalah 1,10%. Sedangkan kontribusi langsung X3 (perlindungan publik) terhadap Y (Partisipasi dalam Pembangunan) adalah 6,38%. Dengan demikian, Perlindungan Masyarakat (X3) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Keikutsertaan dalam Pembangunan Desa (Y) sebagaimana

disajikan dalam uji-t dengan total efek sebesar 6,38%, terdiri dari efek langsung sebesar 2,25% dan efek tidak langsung sebesar 4,13%. Pemberdayaan masyarakat dalam aspek perlindungan masyarakat juga menandakan perlindungan khusus terhadap produk masyarakat, bahkan memfasilitasi pemasaran hasil usaha masyarakat.

4. Rekapitulasi efek langsung dan tidak langsung dari X (Pemberdayaan Masyarakat) pada Y (Partisipasi dalam Pembangunan).

Untuk melihat rekapitulasi efek langsung dan tidak langsung variabel X (Pemberdayaan Masyarakat) pada variabel Y (Partisipasi dalam Pembangunan), dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4
Efek Langsung dan Tidak Langsung Variabel X menuju variabel Y

Variabel	Jalan Koefisien	Langsung Efek (%)	Efek tidak			Langsun g Efek	Jumlah efek
			X1	X2	X3		
X1	0.353	12.44	-	4.61	3.03	7.64	20.08
X2	0.262	6.88	4.61	-	1.10	5.71	12.60
X3	0.150	2.25	3.03	1.10	-	4.13	6.38
Total efek							39.05

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah dan masyarakat Lembaga sosial adalah pemangku kepentingan yang berperan dalam pemberdayaan masyarakat sehingga berdampak pada partisipasi masyarakat. Kondisi ini mendukung pendapat Ginandjar Kartasasmita (1997: 15-16) bahwa pemberdayaan masyarakat harus melibatkan semua potensi yang ada di masyarakat, yaitu: 1) peran birokrasi pemerintah, 2) organisasi sosial di luar masyarakat itu sendiri, 3) lembaga masyarakat yang tumbuh dari dan di dalam masyarakat itu sendiri, 4) koperasi, dan 5) asisten.

Birokrasi pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat harus memahami aspirasi rakyat dan harus peka terhadap permasalahan yang dihadapi rakyat, memberikan kesempatan dan kepercayaan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk membangun diri, keluarga dan satu sama lain. Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya, kewenangan birokrasi harus ditingkatkan ke tingkat terendah dan kualitasnya harus ditingkatkan sehingga benar-benar mampu memberikan bimbingan dan pemberdayaan masyarakat. Penekanan khusus harus diberikan pada pejabat di tingkat yang berurusan langsung

dengan masyarakat, baik secara hierarkis, seperti petugas dan kabupaten, maupun secara fungsional, seperti guru, dokter, bidan dan penyuluh pertanian.

Lebih dari itu, lembaga-lembaga sosial ini telah mengubah pola pikir masyarakat dalam merencanakan pembangunan dari posisi sebagai pendukung menjadi perencana pembangunan untuk kemajuan ke depan. Kondisi ini menunjukkan bahwa mereka sudah memiliki modal sosial yang memungkinkan pengembangan lebih lanjut dari program pembangunan di masa depan.

Selain pemerintah dan organisasi masyarakat, partisipasi masyarakat yang lebih makmur juga sangat dibutuhkan, terutama dunia usaha dan swasta. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada kemitraan bisnis antara mereka yang sudah mampu dan mereka yang masih tertinggal, terutama melalui penyediaan modal usaha untuk pengembangan usaha bagi masyarakat miskin.

Demikian pula lembaga masyarakat seperti Badan Permusyawaratan Desa pada umumnya belum berperan optimal dalam pemberdayaan masyarakat karena kurangnya kapasitas dan fasilitas yang memungkinkan mereka untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya

secara khusus dalam rangka penyusunan dan penetapan rencana pembangunan. Termasuk lembaga ekonomi masyarakat (koperasi unit desa) pada umumnya. tidak berfungsi dalam menunjang kegiatan ekonomi masyarakat.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan diskusi dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemberdayaan masyarakat mempengaruhi partisipasi dalam pembangunan desa. Pengaruh pemberdayaan masyarakat disumbangkan secara bersamaan oleh dimensi penciptaan iklim yang kondusif, peningkatan kapasitas masyarakat dan perlindungan masyarakat.
2. Dari ketiga dimensi tersebut, kontribusi terbesar yang mempengaruhi partisipasi dalam pembangunan adalah dimensi penciptaan iklim yang kondusif, kemudian dimensi peningkatan kapasitas masyarakat, dan kontributor terkecil adalah dimensi perlindungan masyarakat. Artinya, mendukung konsep pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh Ginandjar Kartasasmita (1996).
3. Besarnya kontribusi dimensi dalam menciptakan iklim yang kondusif dikarenakan komitmen dan konsistensi penyelarasan dengan terus melaksanakan program pemberdayaan desa, memberikan kebebasan dan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengelola pembangunan desa, membangkitkan minat masyarakat, dan memastikan pengembangan kegiatan usaha masyarakat berbasis potensi lokal. Sementara itu,

kontribusi dimensi peningkatan kapasitas masyarakat disebabkan oleh upaya peningkatan pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, infrastruktur desa, dan kelembagaan desa. Sementara itu, rendahnya kontribusi dimensi perlindungan masyarakat disebabkan oleh kurangnya perlindungan hukum yang menjamin keberlangsungan pemberdayaan masyarakat, fasilitasi promosi dan pemasaran, serta perlindungan hak-hak masyarakat adat.

Saran

1. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa meskipun pemberdayaan masyarakat berpengaruh terhadap partisipasi dalam pembangunan, kenyataannya partisipasi masyarakat masih rendah. Oleh karena itu, dikedepankan model pemberdayaan masyarakat lokal untuk meningkatkan partisipasi dalam pembangunan desa. Model ini perlu dipelajari lebih lanjut agar bisa lebih sempurna dan dapat diterapkan pada lingkungan dan sistem yang berbeda.
2. Dari hasil penelitian juga diketahui bahwa dimensi perlindungan masyarakat tidak berkontribusi optimal untuk mempengaruhi partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat membuat pemberdayaan masyarakat lebih efektif dalam rangka meningkatkan partisipasi dalam pembangunan.
3. Dalam rangka membuat pemberdayaan masyarakat lebih efektif dalam dimensi peningkatan kapasitas, diharapkan Pemerintah Kabupaten lebih serius untuk mendorong program-program yang mengarah pada peningkatan

pengetahuan dan keterampilan yang mendukung masyarakat dalam mengembangkan potensi lokal yang memungkinkan terciptanya pendapatan tetap yang dapat menjamin kelangsungan hidup masyarakat desa yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Antlöv, H., Wetterberg, A., & Dharmawan, L. (2016). *Tata kelola desa, kehidupan masyarakat, dan UU Desa 2014 di Indonesia*. Buletin Studi Ekonomi Indonesia, 52(2), 161-183.
<https://doi.org/10.1080/00074918.2016.1176629>
- Blancard, Ken. 1998. Penerjemah Y. Maryono. *Empowerment Takes More Than a Minute*. Yogyakarta: Edisi Kedua, Amara Books.
- Blau, Peter M., & Meyer, Marshall W. 2004. Birokrasi dalam Masyarakat Modern. Jakarta: UI Press.
- Bryant, Coralic, & White, G. Louise. 1989. Terjemahan Rusyanto L. Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang. Jakarta: LPES.
- Cohen, JM, & Uphoff, NT 1977. Partisipasi Pembangunan Pedesaan. Ithaca, New York: Universitas Cornell, RDCCIS.
- Conyers, Diana. 1994. Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Cook, Sarah & Macaulai, Steve. 1996. Penerjemah Paloepi Tyas R. Perfect Empowerment. Jakarta: PT Gramedia.
- Firdausy, Anne Keduanya. 2006. Pengaruh Reformasi Harga dan Pasar terhadap Situasi Kemiskinan Masyarakat Pedesaan dan Keluarga Perusahaan. Makalah yang disumbangkan disiapkan untuk presentasi di Konferensi Asosiasi Internasional Ekonom Pertanian, Gold Coast, Australia, 12-18 Agustus 2006.
- Hagul, Peter. 1992. Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Jakarta: Rajawali.
- Hetifah, S. J. 2003. Inovasi, Partisipasi dan Good Governance. Jakarta: Yayasan Obor.
- Hikmat, Harry. 2004. Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Humaniora Utama Press
- Ife, Jim. 1995. Pengembangan Masyarakat: Menciptakan Alternatif Komunitas – Visi, Analisis dan Praktek. Australia: Longman.
- Ife, Jim & Tesoriero, Frank. 2008. Penerjemah Sastrawan Manullang, dkk. Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi. Yogyakarta: Edisi Ke-3, Pustaka Pelajar.
- Jhingan, M. L. 1994. Terjemahan D. Guritno. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Kartasasmita, Ginandjar. 1996. Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. Jakarta: CDES.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2019). Dana Desa Program Overview. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Koentjaraningrat. 1981. Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan. Jakarta: Gramedia.
- Laverack, G., & Labonte, R. (2000). Kerangka perencanaan untuk tujuan pemberdayaan masyarakat dalam promosi kesehatan. Kebijakan dan Perencanaan Kesehatan, 15(3), 255-262. <https://doi.org/10.1093/heapol/15.3.255>
- Lincoln, Arsyad. 1999. Ekonomi Pembangunan. Edisi ke-4, Cetakan Pertama, BPFE, Yogyakarta.
- Mubyarto, & Sartono Kartodirdjo. 1998. Pembangunan Pedesaan di Indonesia. Yogyakarta: Liberty.
- Mubyarto. 1993. Pertumbuhan, Kesenjangan dan Kemiskinan. Makalah disampaikan pada Kongres XII ISEI, 21-23 November, Surabaya.
- Muluk, Khairul, M. R. 2006. Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah. Malang: Bayumedia Publishing.
- Narayan, D. (2002). Pemberdayaan dan Pengurangan Kemiskinan: Buku Sumber. Washington, DC: Bank Dunia.
- Nasikun. 1987. Sistem Sosial Indonesia. Jakarta: CV Rajawali.
- Ndraha, Taliziduhu. 1981. Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Desa di Berbagai Desa. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ndraha, Taliziduhu. 1990. Pembangunan Masyarakat: Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ndraha, Taliziduhu. 2011. Kybernomology (Ilmu Pemerintahan Baru) I. Jakarta: Rineka Cipta.
- Perkins, DD, & Zimmerman, MA (1995). Teori pemberdayaan, penelitian, dan aplikasi. Jurnal Psikologi Komunitas Amerika, 23(5), 569–579. <https://doi.org/10.1007/BF02506982>
- Njaini (1995). Pembelajaran partisipatif untuk pertanian berkelanjutan. Pembangunan Dunia, 23(8), 1247-1263. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(95\)00046-F](https://doi.org/10.1016/0305-750X(95)00046-F)
- Prijono, O. S., & Pranarka, A. M. W. 1996. Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi. Jakarta: CSIS.
- Research Triangle Institute. 2001. Program Dasar Pembangunan Partisipatif. Jakarta: RTI - USAID.
- Roesmedi, & Riza Risyanti. 2006. Pemberdayaan Masyarakat. Jatinangor: Alqaprint. Rusidi.

1993. Pedoman Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah. Bandung: UPT-Ikopin.
- Samuelson, PA, & Nordhaus, WD 2000. Ekonomi. Edisi Keenam Belas, Perusahaan Buku McGraw-Hill.
- Sedarmayanti. 2000. Restrukturisasi dan Pemberdayaan Organisasi Untuk Menghadapi Dinamika Perubahan Lingkungan Ditinjau dari Beberapa Aspek Esensial dan Aktual. Bandung: Mandar Maju.
- Stewart, Aiken M. 1998. Penerjemah Agus M. Hardjono. Perfect Empowerment. Yogyakarta: Kanisius.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Administrasi: Dilengkapi dengan Metode R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2010. Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. Bandung: Refika Aditama.
- Suhendra, K. 2006. Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Alfabeta.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1999. Pemberdayaan Masyarakat dan JPS. Jakarta: PT Gramedia.
- Sutoro, Eko. 2004. Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: APMD Press.
- Sutoro, Eko. 2005. Manifesto Pembaharuan Desa: Persembahan 40 Tahun STPMD “APMD”.
- Tilaar, H. A. R. 2000. Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Globalisasi. Jakarta: Grasindo, PT Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Todaro, Michael P., & Smith, Stephen C. 2003. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Jakarta: Edisi Kedelapan, Penerbit Erlangga.
- Thoha, Miftah. 2002. Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1998. Kebijaksanaan dan Administrasi Pembangunan (Perkembangan, Teori dan Penerapan). Jakarta: LP3ES.
- Tjokrowinoto, Moeljarto. 1987. Politik Pembangunan: Sebuah Analisis, Konsep Arah dan Strategi. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Tjokrowinoto, Moeljarto. 2001. Pembangunan, Dilema dan Tantangan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Urata, Sujiro. 2000. Rekomendasi Kebijakan Promosi UKM di Republik Indonesia. Jakarta: Badan Kerjasama Internasional Jepang (JICA).
- Usman, Sunyoto. 2003. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bank Dunia. (2020). Laporan Pembangunan Dunia 2020: Pembangunan di Daerah Pedesaan.

Washington, DC: Bank Dunia.

Wrihatnolo, Randy R., & Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2007. Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Yogi, Suwarno. 2005. Inovasi Kebijakan dan Pelayanan Publik. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Zimmerman, MA (2000). Teori pemberdayaan: Tingkat analisis psikologis, organisasi, dan masyarakat. Dalam J. Rappaport & E. Seidman (Eds.), Buku Pegangan Psikologi Komunitas (hlm. 43-63). New York: Springer.

Zubaedi. 2013. Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan 1.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dokumen Perencanaan:

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2018 – 2023.